

Article

Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Polikarpus Dore Beda¹, Supardal²

¹ Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

² Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence Author: karbeda888@gmail.com

Abstract: *Srikeminut Tourism Village is one of the Tourism Villages in Bantul Regency. Srikeminut village is very rich with a variety of natural and cultural tourism potentials. There are three tourist points, namely Bukit Sriharjo, Ngepohsari, and Padusan Banyu Bening. In the process of managing tourism villages, various kinds of problems were found such as no arrangement of parking lots, lack of training or assistance, lack of community involvement in the planning process. The research used is descriptive qualitative. The object of this study is the Management of Srikeminut Tourism Village and the obstacles faced in Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region. The research informant selection technique is a purposive sampling technique with 8 informants. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used include: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of the research is that in the process of managing tourism villages, there are two important factors that need to be done, namely: development and institutions. Development consists of planning; in the planning process it looks a little elitist and its planning without any consideration of the anticipation of natural disasters. Implementation, in terms of facilities, both facilities and infrastructure to support the smooth running of activities in tourist attractions are still lacking, for example about roads and internet networks. There is still a lack of coordination between all elements involved in the management of both managers, pokdarwis, village governments and communities. Financing, the community has benefited from the income from tourist villages but there are still no special regulations governing the distribution of proceeds. Control, the supervision process has been carried out by the management group in the form of meetings or deliberations but all forms of input and criticism as evaluation points are not carried out. Institutional, the institutional context referred to here is a matter of regulation.*

Keywords: *Management, Tourism Village.*

Abstrak: Desa Wisata Srikeminut merupakan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Bantul. Desa Srikeminut sangat kaya dengan beragam potensi wisata alam dan budaya. Terdapat tiga titik wisata yakni Bukit Sriharjo, Ngepohsari, dan Padusan Banyu Bening. Dalam proses pengelolaan desa wisata ditemukan berbagai macam masalah seperti belum ada penataan soal lahan parkir, kurangnya pelatihan atau pendampingan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut dan kendala-kendala yang di hadapi di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pemilihan informan penelitian adalah teknik purposive sampling dengan 8 orang informan. Teknik Pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah dalam proses pengelolaan desa wisata ada dua faktor penting yang perlu di lakukan yaitu: pengembangan dan kelembagaan. Pengembangan terdiri dari perencanaan, dalam proses perencanaan terlihat sedikit elitis dan perencanaannya tanpa ada pertimbangan terhadapantisipasi bencana alam. Pelaksanaan, dari sisi fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktivitas di tempat wisata masih kurang, misalnya soal jalan dan jaringan internet. Masih kurangnya koordinasi antara semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan baik pengelola, pokdarwis, pemerintah desa dan masyarakat. Pembiayaan, masyarakat sudah mendapatkan manfaat dengan adanya penghasilan dari desa wisata namun masih belum ada regulasi khusus yang mengatur soal pembagian hasil.

Pengendalian, proses pengawasan sudah dilakukan oleh kelompok pengelola dalam bentuk pertemuan atau musyawarah namun segala bentuk masukan dan kritikan sebagai poin evaluasi tidak dilaksanakan. Kelembagaan, konteks kelembagaan yang dimaksudkan disini adalah soal regulasi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Desa Wisata.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia yang dikenal salah satunya karena obyek wisata yang dapat memikat para wisatawan. Obyek-obyek Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan, dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, dimana pada tahun 1996 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-3 dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara (<https://eprints.akakom.ac.id>)

Kegiatan pariwisata memerlukan adanya suatu objek wisata yang mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri, sehingga menjadi daerah tujuan wisata bagi para wisatawan untuk berkunjung. Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pengelolaan dan pengembangan sektor objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat. Jika objek wisata dipandang sebagai industri maka dari itu bahan bakunya juga tidak akan pernah habis, tidak seperti bahan baku wisata yang lain. Pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata di suatu daerah dapat dijadikan sebagai katalisator pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan kepariwisataan, seperti: kamar untuk menginap (hotel), kuliner, perjalanan wisata (travel agent), dan industri kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

Pengembangan wisata sesuai dengan program pembangunan Kabupaten Bantul saat ini yang bertema "*Makaryo Mbangun Desa*" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul. Makaryo Mbangun Desa sendiri mempunyai arti bekerja membangun desa. Pembangunan Kabupaten Bantul dimulai dari tingkat desa, dimana pemerintah desa berupaya memanfaatkan potensi desa yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pada sektor pariwisata di desa. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang memiliki beragam produk wisata, baik desa wisata maupun fasilitas penunjangnya. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan usaha, dan kesempatan kerja. Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata dapat ditinjau dari jumlah kunjungan wisatawan. PAD yang di dapat Kabupaten Bantul di sektor pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 Pasal 26 ayat 1 mengatakan tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah salah satunya mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata dan desa budaya. Dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk desa wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun

penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal. Pantai merupakan suatu asset yang potensial untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan pendapatan desa.

Kalurahan Sriharjo merupakan kalurahan yang sangat kaya dengan beragam potensi wisata alam dan budaya. Kalurahan Sriharjo menyajikan pemandangan alam berupa perbukitan yang dipenuhi pohon-pohon hijau, dan dibelah sungai yang bersih. Sejumlah gubuk-gubuk tersebar di beberapa titik di pinggiran sungai yang bisa ditempati oleh para wisatawan. Lembah Sungai Oya diapit bukit-bukit menghijau. Aliran Sungai Oya terbentang 106-kilometer berhulu di Gunung Kidul hingga bermuara di pantai selatan Jawa. Terdapat tiga titik wisata yakni Bukit Sriharjo, Ngepohsari, dan Padusan Banyu Bening. Di Area Terasering, wisatawan bisa berfoto-foto di area persawahan hijau bertuliskan Sriharjo yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Tidak hanya itu, di sana juga ada kegiatan Techno Eco Park bagi pengunjung yang ingin mempelajari seputar cara bertani dengan teknik modern. Sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan asri dan menghirup udara kaya oksigen, tak lupa spot foto alam yang tidak boleh terlewatkan.

Namun dalam upaya pengembangan desa wisata juga ditemukan berbagai macam factor baik internal maupun eksternal yang menghambat. Dari hasil observasi awal di kalurahan Sriharjo ditemukan kendala: Pengelolaan desa wisata kalurahan khususnya wisata sungai masih belum optimal. Misalnya belum ada lahan parkir dan masyarakat membuat tarif seikhlasnya

- Masyarakat pengelola tempat wisata tidak pernah diberi pelatihan atau bimbingan untuk peningkatan kapasitas terkait pengelolaan wisata
- Masyarakat yang punya ketrampilan tidak diberi fasilitas atau kewenangan oleh pemerintah desa, misalnya ketrampilan membuat batu akik
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan atau pembangunan khususnya dalam pengelolaan tempat wisata sehingga banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan Desa wisata Srikeminut di Kalurahan Sriharjo Kapenewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengetahui kendala yang di hadapi dalam pengelolaan desa wisata Srikeminut di Kalurahan Sriharjo Kapenewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan desa wisata Srikeminut dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaannya di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ditetapkan berdasarkan kriteria dari penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Dukuh dan para Pengelola Desa wisata serta Masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang di teliti. Terkait dengan lokasi penelitian, peneliti memilih tempat penelitian di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Pengembangan

Dalam pengelolaan desa wisata dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian.

Perencanaan

Dalam sebuah proses pengelolaan, tahapan perencanaan merupakan sebuah proses awal atau dasar yang sangat penting dilakukan. Perencanaan menjadi kekuatan awal bagi sebuah program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan dikemudian hari. Tujuan perencanaan dalam pengelolaan suatu pariwisata agar semua program-program atau kegiatan yang ingin dilakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana atau capaian target yang diinginkan. Perencanaan juga memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan terjadi dikemudian hari. Perencanaan menjadi dasar atau kekuatan terlaksananya tahapan-tahapan lain. Maka sangat penting dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan matang dalam sebuah kegiatan atau program.

Dari beberapa hasil wawancara baik dari Pengelola, Pak Dukuh dan Pemerintah Desa, dapat dilihat bahwa terbentuknya desa wisata Srikeminut murni atas prakarsa masyarakat. Peneliti

menemukan beberapa poin yang dilakukan dalam proses perencanaan yaitu, Pak Suwandi dan beberapa masyarakat sudah mampu dan jeli melihat dan mendata potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Wisata Srikeminut, khususnya potensi alam dan kebudayaan yang ada di desa. Sehingga hal ini yang menurut mereka bisa di jadikan wisata dan tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang kedua Pak Suwandi selaku pemakarsa, memanfaatkan jaringan atau relasinya yang ada untuk diskusi dan bertukar pikiran terkait rencana pembentukan desa wisata. Berkat relasi dan jaringan yang ada mempermudah urusan mereka untuk proses dijadikan desa wisata. Yang ketiga gencar dilakukan sosialisasi ditengah masyarakat sehingga masyarakat bisa dengan mudah memahami maksud dan tujuan terbentuknya desa wisata. yang ke empat desa wisata ini konsepnya yaitu alam dan kebudayaan. Dimana para wisatawan di harapkan dapat menikmati keindahan alam yang masih asli serta suasana pedesaan dan juga wisatawan dapat menikmati kegiatan Techno Eco Park atau kegiatan bertani dengan tehknik modern. Sedangkan untuk wisata budaya, di Srikeminut ada pertunjukan Gejog Lesung, Gejog Lesung merupakan seni musik yang instrumennya menggunakan alat penumbuk padi tradisional. Kelima, konsep slow tourism, hal ini di harapkan agar para wisatawan bisa lebih lama untuk menikmati destinasi wisata yang ada sehingga bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat hal ini di tunjang dengan dibuatkan home stay yang berbentuk rumah kuno jawa namun karena terjadi bencana jadinya home stay yang tersedia sekarang mengikuti masing-masing model rumah warga.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa informan diatas dapat di lihat bahwa dalam proses perencanaan terlihat sedikit elitis. Hal ini di tunjukan dengan gaya komunikasi yang di lakukan Pak Suwandi sebagai pemakarsa selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok elit baik dari tingkat kabupaten sampai pada level pemerintah pusat sementara disisi lain dinamika komunikasi bersama masyarakat terlihat tidak maksimal. Hal lain yang di temukan juga ialah bahwa desa Sriharjo merupakan desa rawan bencana khususnya daerah Srikeminut merupakan salah satu daerah yang rawan akan terjadi bencana dan para pemakarsa tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembentukan desa wisata akibatnya ketika terjadi bencana alam banyak kerusakan di wilayah srikeminut dan membuat aktivitas desa wisata tidak bisa berjalan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penggerakkan (actuating), dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit / satuan kerja yang dibentuk. Diantaranya kegiatan tersebut adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi: pengesahan rencana dan pentahapan program (fasilitas, sarana prasarana, koordinasi dan kerja sama).

1) Pengesahan rencana (sasaran, tujuan dan kebijakan umum)

Maksud dan Tujuan dengan tumbuhnya desa wisata di harapkan:

- a. Terciptanya sebuah wilayah agar lebih tertata dan meningkat lebih baik
- b. Pelestarian lingkungan alam, tradisi dan budaya.
- c. Tersedianya sarana peningkatan ilmu dan pengetahuan.
- d. Pada akhirnya mampu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat akan lebih baik.

(sumber profil desa wisata Srikeminut)

Kebijakan Umum:

- a. Pembaharuan obyek wisata yang sudah ada dan yang belum berjalan
- b. Pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi
- c. Penyadaran tentang sapta pesona pariwisata

(sumber profil desa wisata Srikeminut)

Berdasarkan beberapa penyampaian informan diatas dapat di simpulkan bahwa secara umum dalam tahap pelaksanaan dapat di katakan sudah berjalan sesuai dengan proses yang ada. Hal ini di tunjukan dengan adanya manfaat yang masyarakat rasakan dengan adanya desa wisata. Masyarakat di sekitar lokasi wisata sedikit merasakan efek atau dampak dari adanya desa wisata, sehingga masyarakat sekitar juga ikut di berdayakan dengan berbagai kegiatan atau program dari desa wisata.

Dari sisi fasilitas, baik sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktivitas di tempat wisata sebenarnya sudah cukup memenuhi namun dilihat masih banyak yang masih menjadi kekurangan juga. Hal ini bisa di lihat dari fasilitas jalan yang masih banyak yang rusak dan juga kondisi jalan

yang masih kecil sehingga sangat mengganggu aktivitas keluar masuk para pengunjung. Apalagi wilayah desa Srikeminut juga salah satu daerah rawan bencana sehingga fasilitas-fasilitas dasar seperti jalan, jembatan dan lain-lain sangat penting untuk di perhatikan dan spot-spot wisata yang ada juga sangat perlu untuk di tata kembali khususnya di sepanjang sungai oyo. Hal lain juga yang perlu di perhatikan yaitu soal ketersediaan jaringan internet. Karena wilayah Srikeminut yang memang berada di dataran rendah dan diapiti bukit-bukit yang tinggi sehingga soal jaringan internet disana juga masih cukup terganggu perlu di perhatikan. Faktor lain juga yang menjadi catatan dan kekurangan juga yaitu dalam hal kerja sama dan koordinasi dari semua elemen yang ada. Dilihat bahwa dari semua bentuk kerja sama yang ada baik dengan pihak pemerintah maupun yang di luar pemerintah juga kegiatannya kadang hanya sampai pada tahap sosialisasi atau pelatihan. Namun setelah pelatihan atau sosialisasi tidak ada keberlanjutan yang membuat beberapa hal yang pernah di buat bersama tidak terurus dengan baik misalnya dalam bidang pertanian yang pernah bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi awal baik dari pihak pengelola, pemerintah desa, dinas-dinas terkait dan bahkan lembaga di luar pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri sehingga apa yang menjadi poin kerja sama diawal tidak bisa berjalan dengan baik. Lemahnya fungsi koordinasi juga terlihat dalam internal para kelompok pengelola, hal ini terbukti dengan di beberapa titik lokasi spot wisata tidak terurus dengan baik, baik soal kebersihan dan keindahan juga terutama soal MCK, pengaturan retribusi parkir dan lahan untuk parkir. Soal koordinasi juga kadang kurang berjalan baik antara pemerintah desa dengan pihak pengelola seperti yang pernah terjadi bahwa pemerintah desa menerima tamu untuk berwisata di Srikeminut namun ternyata teman-teman di lapangan belum ada persiapan sehingga kegiatannya kurang berjalan baik.

Pembiayaan

Sumber biaya pengembangan pariwisata disuatu Negara/daerah dapat dikelompokkan kedalam empat golongan besar, yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (objek wisata, daya tarik wisata), pembangunan sarana/usaha (pajak) dan biaya pemantauan.

Tabel 1.
Buku Kas Pengelola Desa Wisata Srikeminut

No	Tanggal	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
1	01/08/2019	Saldo	-	-	2.300.000
2	01/08/2019	Konsumsi	-	250.000	2.050.000
3	01/08/2019	Konsumsi	-	250.000	1.800.000
4	01/10/2019	Konsumsi	-	100.000	1.700.000
5	12/11/2019	Konsumsi	-	150.000	1.550.000
6	12/11/2019	Pokdarwis Desa	400.000	-	1.950.000
7	12/11/2019	Pasir	250.000	-	2.200.000
8	12/11/2019	Syuting	600.000	-	2.800.000
9	12/11/2019	STTKD	100.000	-	2.900.000
10	31/12/2019	STTKD	100.000	-	3.000.000
11		Konsumsi	-	250.000	2.750.000
12	12/01/2020	STTKD	500.000		3.250.000
13		Konsumsi	-	250.000	3.000.000
14	01/02/2020	Outbond	100.000	-	3.100.000
15	01/02/2020	Konsumsi	-	250.000	2.850.000
16	16/02/2020	Konsumsi kerja bakti	-	250.000	2.600.000
17	19/02/2020	Pasir	-	600.000	2.000.000
18	19/02/2020	Konsumsi		350.000	1.650.000
19	19/02/2020	Tegluk	-	200.000	1.450.000
20	19/02/2020	Lain-lain	-	250.000	1.200.000
21		Subsidi Desa	800.000	-	2.000.000
22		Konsumsi	-	600.000	1.400.000
23	05/03/2020	Hadiah Lomba	3.000.000	-	4.400.000
24		Pajak	-	300.000	4.100.000
25		Op Pokdarwis	-	600.000	3.500.000

No	Tanggal	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
26		Konsumsi Pertemuan	-	250.000	3.250.000
27		Konsumsi Pertemuan	-	75.000	3.175.000
28		Kartu Parkir	-	240.000	2.935.000
29		Pembuatan Proposal	-	30.000	2.905.000
30		Konsumsi	-	80.000	2.825.000
31	10/07/2020	Belanja(watu,kuas, nat,clear)	-	125.000	2.700.000
32	15/12/2021	Kas dari Pemuda	1.000.000	-	3.700.000
33		Sablon Kaos Pengelola	-	450.000	3.250.000

Sumber: Profil Desa Wisata Srikeminut 2022

Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan penghasilan dari pengelolaan Desa Wisata Srikeminut selama ini sebenarnya masyarakat atau para pengelola sudah merasakan manfaatnya selama ini. Pemasukan yang paling besar selama ini yang di dapat yaitu terutama dari biaya parkir yang sudah meraup puluhan juta. Pemasukan-pemasukan yang ada ini tentunya di pakai sesuai dengan pembagian seperti yang di sampaikan oleh ketua pengelola yaitu ada yang di pakai untuk biaya pengembangan wisata, ada yang di pakai untuk gaji pengelola serta juga di pakai untuk kas-kas rt.

Namun fenomena yang di lihat oleh peneliti bahwa karena belum adanya regulasi yang jelas terkait bagaimana pembagian hasil ini maka menimbulkan fenomena yang kurang baik di tengah masyarakat yaitu adanya kecurigaan terhadap sesama mereka baik kelompok pengelola maupun juga dari kalangan masyarakat. Hal ini tentunya menunjukkan sebenarnya masih belum ada keterbukaan terhadap pengelolaan selama ini.

Pengendalian

Menurut Manullang (dalam Suriansyah 2014) Pengendalian atau pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitan ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsistensi inilah relevansinya pengawasan dilakukan. Keberhasilan suatu bentuk pengawasan apakah itu yang berada dalam kelembagaan public misalnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif maupun pengawasan di kelembagaan privat sangat ditentukan kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi maupun yang mengawasi sesuatu kegiatan di bidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan (Makmur, 2015:177).

Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh beberapa informan, menunjukkan bahwa proses pengawasannya sudah di lakukan selama ini oleh kelompok pengelola dan bentuk pengawasannya seperti sering mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas serta mengevaluasi segala bentuk masukan dan kritikan yang ada. Namun yang menjadi masalah ialah bahwa apa yang menjadi hasil pertemuan atau musyawarah sering kali tidak di jalankan. Hal ini menunjukkan kinerja kelompok pengelola ini kurang berjalan dengan baik dan hal ini merujuk pada kenyataan di lapangan bahwa pengelolaannya memang terlihat seperti tidak terurus dengan baik. Hal lain juga yang terlihat yaitu peran seorang ketua yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya terutama soal ketegasan dan bagaimana mengakomodir para anggotanya. Hal lain juga yaitu persoalan yang terjadi di tingkatan elit-elit padukuhan. Hal ini juga dilihat sebagai salah satu factor penghambat.

Kelembagaan

Menurut North (dalam Bambang Sunaryo, 2013) Keberadaan suatu organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataan pada kenyatannya dapat berada di tingkat masyarakat, swasta/industri atau bisnis, maupun ditingkat pemerintah dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kelembagaan dalam pengertian ini lebih mengacu pada keseluruhan regulasi yang mengatur tata kelola kepariwisataan, yang dapat terdiri dari peraturan (konstitusi, undang-undang, dan regulasi) dan pelaksanaannya (2013:198).

Berdasarkan apa yang di sampaikan beberapa informan di atas dapat simpulkan bahwa pertama yaitu, pemerintah desa sebenarnya belum mampu untuk memfasilitasi apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat dalam konteks ini khusus terkait regulasi. Ketika masyarakat di lapangan sudah semangat mengembangkan sesuatu yang menurut mereka dapat memberikan keuntungan bagi mereka namun nyatanya pemerintah desa malah masih lambat untuk merespon. Walaupun sudah ada upaya pemerintah desa dengan menerbitkan peraturan desa tentang pembentukan desa wisata walau masih dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan.

Kedua, dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana pentingnya ada regulasi atau aturan secara formal. Sehingga fenomena-fenomena yang di sampaikan oleh para informan di atas dapat diatasi dengan baik dan regulasi atau aturan yang di buat itu nanti dapat menjadi acuan dasar bagi pengelola dalam mengelola desa wisata Srikeminut.

Kendala Dalam Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut

Dalam proses pengelolaan desa wisata tentu tidak berjalan mulus begitu saja, tentu mengalami banyak masalah atau kendala. Hal yang sama juga di alami dalam proses Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut baik pihak Pemerintah Desa, Pokdarwis dan Kelompok Pengelola serta Masyarakat pun mengalami kendala.

Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh para informan di atas dapat di simpulkan beberapa kendala-kendala yang di hadapi yaitu pertama, soal Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari tingkat pokdarwis, pengelola maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi faktor dasar yang dapat menentukan berkembang tidaknya sebuah desa wisata. Kedua, yaitu kondisi wilayah Desa Wisata Srikeminut yang memang daerah rawan bencana sehingga ketika terjadi bencana aktivitas di ditempat wisata juga ikut terganggu. Ketiga, karena sebagian spot wisata di Srikeminut mengandalkan wisata air (sungai oya) jadi ketika masuk musim penghujan sebagian spot wisata yang ada di tutup dan tidak bisa beraktivitas dan hal ini tentunya memberikan kerugian bagi para pelaku wisata baik itu pengelola maupun masyarakat yang punya usaha disana. Keempat, kondisi infrastruktur seperti jalan masih ada yang rusak, jalan berlubang dan kondisi jalan juga yang sempit yang tentunya sangat mengganggu aktivitas di tempat wisata terutama ketika dalam kondisi ramai.

Kelima, berkaitan dengan fasilitas jaringan internet, sebagian wilayah Srikeminut masih mengalami kendala. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Srikeminut terutama ketika bagaimana mereka berkomunikasi dengan pihak luar atau sebaliknya ketika pihak keluar yang coba berkomunikasi dengan mereka pasti mengalami kendala. Keenam, yaitu soal minimnya keterlibatan anak-anak muda. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala jangka panjang yang akan dihadapi oleh warga Srikeminut karena hal ini menyangkut soal regenerasi baik di kelompok pengelola maupun pokdarwis. Karena tak bisa di pungkiri bahwa dengan perkembangan zaman sekarang yang cukup pesat maka untuk mengelola desa wisata Srikeminut kedepannya juga sangat di butuhkan pikiran-pikiran atau masukan dari kaum muda yang mengerti akan zamannya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan para wisatawan tetapi bukan berarti untuk merubah apa yang menjadi ciri khas atau tradisi yang sudah wariskan. Melainkan untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi turun temurun yang sudah diwariskan dan bagaimana hal ini di kombinasikan dengan perkembangan zaman yang sekarang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam tahap perencanaan kesimpulan yang dapat di ambil yaitu, pertama bahwa proses perencanaan sebenarnya sudah di laksanakan namun dalam tahapan awal soal perencanaan pembentukan desa wisata Srikeminut terkesan elitis, hal ini di tunjukan dengan gaya yang komunikasi yang di lakukan Pak Suwandi dan kawan-kawan yang lebih dominan ke pemerintah supra desa ketimbang memperkuat komunikasi dengan masyarakat Srikeminut sendiri. Kedua, proses perencanaan ini sebenarnya belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan bahwa daerah Srikeminut yang memang di tetapkan sebagai daerah rawan bencana namun pengelola dan pemerintah desa belum memikirkan dampak ketika terjadi bencana dan ketika pergantian musim terutama ketika memasuki musim penghujan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan desa wisata Srikeminut dapat di simpulkan bahwa pertama, dari sisi fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang aktivitas wisata ketersediaannya sudah cukup namun yang perlu di perhatikan yaitu soal kondisi jalan yang masih banyak yang rusak dan juga ukuran jalan yang masih sangat kecil. Kedua, soal kerja sama yang di bangun oleh pengelola baik dengan pemerintah desa maupun pemerintah supra desa dan lembaga-lembaga atau kelompok di luar pemerintahan sebenarnya belum berjalan dengan baik. Seringkali hasil dari kegiatan kerja sama yang di

bangun belum mendapatkan hasil yang baik atau tidak ada keberlanjutannya misalnya dalam kegiatan pelatihan atau sosialisasi.

Dalam tahap pembiayaan pendapatan yang di hasilkan sebelum pandemi sebenarnya sudah memberikan keuntungan atau bisa menjadi pemasukan bagi masyarakat di Srikeminut maupun para pengelola. Walaupun pendapatan yang terbesar yaitu masih dari parkir namun sebenarnya sudah memberikan dampak langsung bagi masyarakat, misalnya untuk dana pengembangannya, untuk gaji para pengelola bahkan bisa untuk simpanan kas RT. Namun tetap di butuhkan regulasi atau aturan yang formal soal pembiayaan dan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan pembiayaan sehingga tidak menimbulkan rasa curiga satu sama lain. Dalam tahapan pengendalian selama ini khususnya sebelum pandemi seringkali diadakan pertemuan atau evaluasi yang membahas soal masukan maupun evaluasi terhadap kinerja pengelola maupun soal perkembangan pengelolaan desa wisata Srikeminut. Namun hasil dari pertemuan atau evaluasi yang di adakan sering kali tidak di jalankan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa proses pengawasan sebenarnya tidak di laksanakan dengan baik. Pertemuan atau evaluasi yang diadakan hanya sebatas formalitas sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan tugas.

Dalam konteks kelembagaan yang dalam hal ini lebih di pahami kearah regulasi atau aturan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemerintah desa belum mampu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal ini soal membuat regulasi tentang desa wisata. Karena regulasi ini tentunya yang akan menjadi kekuatan hukum dan pedoman dasar dari pihak pengelola ataupun masyarakat dalam mengelola desa wisata. Kendala yang di hadapi dalam proses pengelolaan desa wisata Srikeminut yaitu pertama kendala soal Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari pengelola, pokdawris dan masyarakat itu sendiri. Kedua, kondisi wilayah daerah Srikeminut yang termasuk daerah rawan bencana. Ketiga, yaitu soal wisata musiman. Ketika masuk musim penghujan sebagian aktivitas wisata tidak bisa di jalankan. Keempat, kondisi infrastruktur jalan dan sarana penunjang lainnya. Kelima, kendala soal fasilitas jaringan internet. Keenam, minimnya keterlibatan anak muda terutama soal bagaimana menyumbangkan ide atau gagasan soal dunia kepariwisataan zaman sekarang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang ada kiranya peneliti dapat memberikan saran untuk pengelolaan desa wisata Srikeminut yang lebih baik:

1. Perencanaan
Pentingnya sebuah perencanaan yang baik dan matang terutama soal pencegahan dan efek atau dampak ketika terjadinya bencana alam mengingat Srikeminut merupakan salah satu wilayah yang rawan akan terjadi bencana. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan baik itu di tingkatan pengelola maupun di pemerintah desa.
2. Pelaksanaan
Pentingnya peningkatan SDM baik di pengelola, pokdarwis dan juga masyarakat untuk peningkatan kapasitas misalnya dalam hal pelatihan atau sosialisasi tetapi yang sifatnya berkelanjutan. Sehingga memberikan dampak atau efek yang terasa di kalangan masyarakat maupun pengelola dan pokdarwis. Pentingnya peningkatan atau perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan pelebaran ruas jalan serta peningkatan fasilitas jaringan internet serta pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan di fasilitas-fasilitas umum di area wisata.
3. Pembiayaan
Dalam hal pembiayaan agar lebih transparan pada masyarakat dengan cara menampilkan pengumuman pendapatan kemudian realisasinya agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Pentingnya juga membangun kerja sama dengan pihak-pihak di luar misalnya dengan pihak-pihak swasta yang kira dapat memberikan bantuan dana atau modal untuk menunjang kegiatan atau aktivitas di desa wisata.
4. Pengendalian
Dalam hal pengendalian pentingnya di lakukan pengawasan yang baik terhadap kinerja pengelola. Selain itu setiap hasil evaluasi atau dalam pertemuan sangat penting untuk diawasi lebih lanjut soal masukan dan catatan-catatan yang ada.
5. Kelembagaan
Pemerintah desa harus mampu dan secepat mungkin membentuk peraturan-peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Terutama soal Perdes Pembentukan Desa Wisata, Perdes tentang Retribusi dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Andi M. Sammeng 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ayuningsih, Pridia, Teviningrum. 2019. *Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulon Progo, Purworejo) Belitung Timur, Malang Raya*. Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata
- DjamaL, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwin, Gamar. (2015). *Studi tentang pembentukan desa setulang sebagai desa wisata di kecamatan malinau selatan hilir kabupaten malinau.jurnal pemerintahan integratif*, hal 152-1638.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- M. Munadhiroh. 2013. *Jurnal Konsep Pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)*, enprints.
- Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Simanungkalit, Sari, Teguh Frans dkk. 2017. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Syaiful Bahri Rurali. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Alumni.
- Yuliati, Suwandono. 2016. *Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang*. Jurnal Ruang. Vol. 2, No. 4. https://eprints.akakom.ac.id/9007/2/2_135410112_BAB_I.pdf), diakses pada tanggal 1 September 2021
- [file:///C:/Users/62852/Downloads/1259-5015-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/62852/Downloads/1259-5015-1-PB%20(1).pdf)) diakses pada tanggal 30 september 2021.
- [file:///C:/Users/62852/Downloads/3377-6879-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/62852/Downloads/3377-6879-1-SM%20(2).pdf))i diakses pada tanggal 30 september
- <file:///C:/Users/62852/Downloads/53225-1141-125066-1-10-20190920.pdf>) diakses pada tanggal 30 september 2021.
- Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015 – 2025

